

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dalam bahasa Yunani *demos* dan *kratos*. *Demos* berarti rakyat, sedangkan *kratos* berarti pemerintahan. Maka dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat. Disamping itu demokrasi juga dimaknai dengan kebebasan untuk mengemukakan pendapat terlebih untuk mengontrol kekuasaan lembaga pemerintahan<sup>1</sup>

Demokrasi adalah gagasan yang diibaratkan dengan kekuasaan dari, oleh dan untuk rakyat. Artinya kekuasaan tertinggi itu berada ditangan rakyat . Oleh karena itu, rakyat berperan penting dalam menentukan dan memberi arah, serta mengontrol dan menjadi pengawas kehidupan kenegaraan. Bahkan, pemerintahan yang baik itu diidealkan dengan pengelolaan negara yang melibatkan rakyat didalamnya. Maksudnya adalah rakyat ikut berperan aktif dalam peyelenggaraan pemerintahan agar terselenggaranya kesejahteraan bersama.<sup>2</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa hakikat demokrasi adalah rakyat memiliki kedaulatan tertinggi untuk mengontrol dan menjadi pengawas

---

<sup>1</sup>Nur Sakinah Harahap, Skripsi : “ *Konsep Demokrasi Dalam Filsafat Politik Ibn Ruysd Terhadap Teori Plato* “ ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 1.

<sup>2</sup>Sodikon, *Budaya Demokrasi* (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), hlm. 39-41.

lembaga pemerintahan yang dijalankan oleh penguasa agar bisa menyematani kesejahteraan rakyat.

Saat ini kebebasan dan demokrasi telah menjadi bagian penting dalam interaksi antar sesama manusia. Walaupun demokrasi berasal dari dunia Barat. Ia telah menjadi wabah global. Hampir dapat dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia ini yang sepi dari tuntutan sistem demokrasi. Meskipun dalam segi praktek demokrasi memiliki perbedaan di masing-masing kawasan dunia, demokrasi telah menjadi alat bagi masyarakat dunia untuk mewujudkan kebebasan individu dan hak-haknya sebagai warga negara.<sup>3</sup>

Para pendiri bangsa sendiri menggagas demokrasi Indonesia sebagai langkah menolak sistem demokrasi Barat. Demokrasi di Indonesia di bangun diatas dasar Ideologi Pancasila, yaitu demokrasi “*permusyawaratan perwakilan*” dalam bentuk negara kesatuan. Kemudian di implementasikan dalam bentuk pemilihan kepala negara baik ditingkat nasional maupun lokal. Tetapi, setiap perubahan tersebut lebih banyak diiringi politik kepentingan para elit dari pada hasil kajian konseptual yang matang dan mekanisme publik.<sup>4</sup>

Sebagai konsekuensi dari proses globalisasi sejak awal berdirinya, Indonesia tidak bisa menghindar dari peta kekuatan dunia. Hal ini sangat jelas

---

<sup>3</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan :Pancasila, Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani* (Jakarta : KENCANA, 2017), hlm. 65.

<sup>4</sup>Muhammad Aqil Irham, *Demokrasi Muka Dua* ( Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2016), hlm. 36.

terlihat dalam perjalanan “demokrasi ala Indonesia“ yang pernah dijalankan dalam beberapa bentuk. Indonesia pernah menerapkan demokrasi liberal pada pemilu 1955, demokrasi terpimpin setelah dibubarkan konstituante dan dekrit presiden 5 Juli 1959 sampai penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan demokrasi permusyawaratan/perwakilan di MPR dan DPRD dalam pemilihan presiden dan kepala daerah selama masa orde baru.

Pada masa reformasi, istilah demokrasi perwakilan dan demokrasi langsung baik dalam pemilihan presiden maupun kepala daerah. Sejak 1959 hingga berakhirnya kekuasaan Soekarno pada 1969, dan selama pemerintahan orde baru hingga keruntuhannya pada 1998, dan tiba pada masa dimana Indonesia mulai menggagas konsep demokrasi pancasila sebagai konsep yang paling ideal untuk menjamin keperluan rakyat. Namun sistem demokrasi di Indonesia juga bisa dikatakan belum mampu diwujudkan sepenuhnya dalam realitas kehidupan bernegara termasuk untuk menjamin kesejahteraan dan kepentingan rakyat.<sup>5</sup>

Etika termasuk dalam bagian Filsafat praktis yang terbagi dibagi dalam dua kelompok yaitu *etika umum* dan *etika khusus*. Etika adalah ilmu dasar tentang ajaran dan pandangan moral. Atau bisa dikatakan etika adalah suatu ilmu yang membahas tentang baik dan buruk suatu tindakan atau perbuatan manusia. Yang pada hakikatnya etika ingin memberikan arahan agar

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm. 37-38.

mampu mengambil sikap yang bertanggungjawab dalam segala tindakannya terhadap ajaran moral

Etika umum ingin menjelaskan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip tersebut dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus dibagi menjadi etika individual yang menjelaskan kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lainnya dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan bagian terbesar dari etika khusus.<sup>6</sup>

Etika dalam politik dapat memberikan dasar atau pondasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan sistem pemerintahan dengan tolok ukur kepentingan rakyat. Namun fungsi etika politik hanyalah penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk menjelaskan legitimasi politik secara bertanggungjawab.<sup>7</sup>

Islam mengatur etika dan moral penguasa, baik didalam Al-qur'an maupun hadis Nabi Muhammad Saw dan Ijma para ulama. Ajaran etika dan moral dalam kehidupan masyarakat merupakan etika dan moral kepemimpinan, namun inti dari semua itu adalah bagaimana agar bisa mengimplementasikan amanah dan keadilan dalam segi praktek.

---

<sup>6</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila* ( Yogyakarta : PARADIGMA, 2016), hlm.79.

<sup>7</sup>Runi Hariantati, “ *Etika Politik Dalam Negara Demokrasi* “ Jurnal Demokrasi 2, no. 1 (2003): hlm.61

sebagaimana dalam Firman Allah swt dalam QS. An- Nahl ayat 90 yang memerintahkan untuk menjalankan konsep etika dalam kehidupan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang pada perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada mu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>8</sup>

Al-Ghazali diberikan julukan *Hujjatul Islam*, al-Ghazali dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia Islam terkhusus pada abad pertengahan, yang dinisbatkan pada keberhasilannya dalam menggabungkan masalah hukum Islam (*fiqih*) dengan ajaran moral (*tasawuf*). Tidak hanya itu, Imam al-Ghazali juga menyinggung permasalahan kenegaraan, dan merespon berbagai keadaan kenegaraan disekitarnya dengan pemikirannya secara mendalam. Imam al-Ghazali juga banyak menyinggung masalah etika dan moral sebagai landasan dalam pengelolaan bernegara, sebagaimana yang tercantum pada kitab *At- Tibr Al-Masbuk fi Nasihat Al-Muluk*. Yang membahas mengenai bagaimana cara mengelola negara dengan baik.<sup>9</sup>

Kedaulatan tertinggi menurut Al-Ghazali, bukan lah terletak ditangan rakyat seperti konsep yang di usung oleh demokrasi. Melainkan berada

---

<sup>8</sup>Depertemen Agama RI, *Al- qur'an dan Terjemah*( Semarang : Toha Putra, 1989), hlm. 277.

<sup>9</sup>Rahmat Saleh, “*Relevansi Etika Politik Imam Al-Ghazali Dalam Pemerintahan Di Indonesia*” ( Tesis, Pascasarjan, :UIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 1.

ditangan Tuhan. Atau dengan kata lain hukum-hukum Allah mejadi pondasi dalam pengelolaan sistem kenegaraan.

Menurut al-Ghazali penguasa adalah pelindung Allah di muka bumi dan wajib hukumnya bagi rakyat untuk taat kepada penguasa dan melaksanakan perintahnya.<sup>10</sup> Maka dapat disimpulkan bahwa sistem pemerintahan yang digagasan al-Ghazali menyerupai sistem teokrasi. Yaitu pemerintahan yang tidak bisa lepas dari ajaran agama.<sup>11</sup>

Pemikiran politik al-Ghazali dilatarbelakangi oleh pengalaman-pengalaman al-Ghazali dengan dunia kekuasaan pada masanya dan keilmuannya yang mendunia. Hal yang menonjol dari sosok al-Ghazali adalah yang berkenaan dengan ajaran tasawuf dan peningkatan spritualitas. Pada masa al-Ghazali praktik politik banyak yang menyimpang dari jalur syari'at seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan dan krisis ulama. Al-Ghazali memberikan kritik tajam pada ulama waktu itu karena banyakulama yang terikatdalam ambisi duniawi. Ulama yang tadi berfungsi sebagai penasehat, pengontrol dan pengawas bagi kepala negara dalam menjalankan

---

<sup>10</sup>Ahmadie Thaha & Ilyas Ismail, *Nasihat Al- Ghazali bagi Penguasa diterjemahkan dari kitab Al- tibr al Masbukl fi Nasihah Al- Muluk karya Imam Al- Ghazali*( Bandung : Penerbit Mizan, 1994 ), hlm.125.

<sup>11</sup>Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* ( Jakarta : UI-Press, 1993), hlm. 78.

kekuasaan tidak dilaksanakan dengan baik.<sup>12</sup> Hal tersebut bertentangan dengan misi dan visi ulama menurut al-Ghazali.

Al-Ghazali mengemukakan teori kepemimpinan sekaligus mengungkapkan teori gabungan negara moral atau *siyasatul akhlak* dengan mengemukakan, “kewajiban mengangkat kepala negara bukanlah berdasarkan rasio, melainkan berdasarkan syari’at Islam atau dengan kata lain menggunakan hukum-hukum Allah sebagai acuan dalam masalah pemerintahan “. Oleh karena itu, agama dan penguasa adalah dua saudara kembar yang lahir dari satu ibu yang sama. Agama adalah pedoman atau pondasi sedangkan negara adalah pelindung nya. Berdasarkan konsep kenegaraan menurut al-Ghazali, “ tidak ada pemisahan antara agama dan negara”. Negara membutuhkan agama sebagai pondasi begitupun sebaliknya.

Dengan demikian, agama tidak hanya mengatur kehidupan individual melainkan juga kehidupan bermasyarakat, agama tidak hanya membahas mengenai ibadah saja melainkan juga masalah etika, hubungan antar anggota keluarga, masalah sosial ekonomi, politik, perundang-undangan negara, hak dan kewajiban warga negara, sistem peradilan, hubungan politik luar negeri dan sebagainya. Ini artinya antara agama dan negara saling terkait untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berlandaskan moral.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Rahmat Saleh,: “*Relevansi Etika Politik Imam Al-Ghazali Dalam Pemerintahan Di Indonesia*” ( Tesis, Pascasarjana UIN Antasari, Banjarmasin, 2015), hlm.4.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 5.

Dari uraian diatas tampak bahwa konsep demokrasi dalam pandangan etika politik Imam al-Ghazali memiliki kontradiksi mengenai sistem demokrasi, dimana kedaulatan berada ditangan rakyat. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali. Apakah memang benar konsep demokrasi di Indonesia memang seratus persen bertolak belakang dengan sistem pemerintahan yang Imam al-Ghazali kehendaki.

Berdasarkan paparan yang telah diuraikan diatas maka penulis memilih formulasi judul **“KONSEP DEMOKRASI DI INDONESIA MENURUT ETIKA POLITIK IMAM AL-GHAZALI”**

#### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, terdapat rumusan masalah yaitu bagaimana konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali?

#### C. Tujuan Penelitian

Maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih dalam lagi bagaimana sistem demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali.

#### D. Singnifikansi Penelitian

1. Secara keilmuan yaitu agar bisa menambah wawasan yang lebih luas mengenai ilmu tentang Konsep Demokrasi di Indonesia menurut Etika Politik Imam al-Ghazali. Dan diharapkan agar penelitian ini



dapat memberikan dampak positif terhadap kemajuan studi Hukum Tata Negara khususnya yang berkenaan dengan Konsep Demokrasi Di Indonesia menurut Etika Politik Imam al-Ghazali. Serta untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai konsep demokrasi dalam pandangan politik al-Ghazali. Bagaimana Makna demokrasi dan penerapan demokrasi dalam negara indonesia itu sendiri.

2. Agar bisa ikut berkontribusi dalam menambah keilmuan untuk Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Dan tentunya untuk memenuhi tugas akhir dan melengkapi syarat agar bisa memperoleh gelar Sarjana Jurusan Hukum Tata Negara.

#### E. Definisi Istilah

1. Etika adalah ilmu yang mempelajari tentang konsep baik dan buruk. Jadi bisa dikatakan etika berfungsi sebagai pedoman atau pondasi untuk setiap manusia agar bisa mempraktekkan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk.<sup>14</sup>
2. Politik adalah serangkaian pengelolaan negara yang meliputi pembuatan kebijakan, pengelolaan keputusan, alokasi dana, pendistribusian, yang pada hakikatnya bertujuan untuk

---

<sup>14</sup>Amin Abdullah, *Antara Al- Ghazali dan Kant : Filsafat Etika Islam*, Cet, 1 ( Yogyakarta : IRCiSoD, 2020 ), hlm. 7.

mensejahterakan rakyat atau untuk memenuhi kepentingan orang banyak yang berdasarkan keputusan bersama.<sup>15</sup>

3. Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana rakyat harus berpartisipasi aktif terhadap pembuatan kebijakan, rakyat berhak untuk ikut serta dalam pengelolaan dan mengawasi jalannya kekuasaan baik secara langsung misalnya melalui ruang ruang publik (*public sphere*) maupun melalui wakil yang telah dipilih secara langsung oleh rakyat dengan mekanisme pemilu, sehingga tujuan tujuab untuk memprioritaskan kepentingan rakyat mampu terwujud.<sup>16</sup>
4. Imam al-Ghazali, merupakan salah satu tokoh pemikiran keislaman, pengetahuan al-Ghazali meliputi fikih, ushul fikih, teologi, filsafat, tasawuf, akhlak dan lain sebagainya, kecuali ilmu hadis yang telah diakui sendiri oleh Imam al-Ghazali. Dari sisi lain, al-Ghazali merupakan salah pemikir tasawuf, pejuang syariat Islam, dan tokoh pendidikan serta dakwah menuju Allah. al-Ghazali juga merupakan tokoh ilmu, amal, dakwah dan reformasi serta salah satu *rabbani* yang tahu beramal dan mengajarkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* ( Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007 ), hlm. 16.

<sup>16</sup>Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 2.

<sup>17</sup>Yusuf al-Qardhawi, *Imam Al-Ghazali Kontroversi Pemikiran Sang Hujjatul Islam* (Tangerang: PT. Lentera Hati, 2020), hlm. 2-3

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan agar menghindari kesalahan dan tentunya untuk memperjelas penelitian yang peneliti angkat. Sejauh peneliti lakukan, peneliti belum menemukan penelitian tentang Konsep Demokrasi Di Indonesia menurut Etika Politik Imam al- Ghazali. Akan tetapi, peneliti menemukan beberapa kajian atau penelitian yang berhubungan dengan etika politik namun berbeda pembahasan yakni sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis Husni Mubarak ( 03511461) Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam dengan judul “Etika Politik Dalam Pandangan Imam al- Ghazali ( Kajian terhadap kitab *Al- Tibr Al- Masbuk Fi Nasihah al- Muluk* )“ Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitik.<sup>18</sup> Judul skripsi di atas memiliki persamaan yaitu membahas mengenai pandangan Imam al-Ghazali tentang etika politik. Adapun perbedaannya, memfokuskan konsep Demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali.
2. Skripsi yang ditulis Alba Roma Triwijaya ( 1421020048) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “Analisis Perbandingan

---

<sup>18</sup>Husni Mubarak, Skripsi : “*Etika Politik Dalam Pandangan Imam Al- Ghazali ( Kajian terhadap kitab Al- Tibr Al- Masbuk Fi Nasihah al- Muluk )*” ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008 ), hlm. 9.

Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun“ Metode yang digunakan adalah penelitian pustaka. yang bersifat deskriptif analitik komparatif.<sup>19</sup> Judul skripsi di atas memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Etika Politik dari seorang tokoh. Perbedaannya adalah Skripsi yang penulis angkat akan memfokuskan pada pembahasan konsep Demokrasi.

3. Skripsi yang ditulis A. Fikri Thia Naufal ( 16210220405 ) Mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung Jurusan Hukum Tata Negara dengan judul “Etika Politik Menurut Mahfud MD Dalam Perspektif Fiqih Siyasah“ Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif analitis.<sup>20</sup> Judul skripsi di atas memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Etika Politik dari seorang tokoh. Perbedaan adalah skripsi yang peneliti teliti memfokuskan konsep Demokrasi dalam pandangan etika politik seorang tokoh.
4. Skripsi yang ditulis Sugiyono ( 103033227801 ), Mahasiswa Fakultas Ushuluddun dan Filsafat Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta Jurusan Pemikiran Politik Islam dengan Judul “Konsep Etika Politik dalam perspektif Ali Syari’ati“ Penelitian ini termasuk penelitian

---

<sup>19</sup>Alba Roma Triwijaya, Skripsi : “*Analisis Perbandingan Corak Pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah dan Ibnu Khaldun*” ( Lampung : UIN Raden Intan Lampung, 2018 ), hlm. 13.

<sup>20</sup>A. Fikri Thia Naufal, skripsi : “*Etika politik menurut Mahfud MD dalam perspektif Fiqih siyasah* ” ( Lampung : UIN Raden Fatah Lampung, 2020 ), hlm. 9-11.

pustaka. Sedangkan jenis penelitiannya adalah deskriptif analitis.<sup>21</sup> Judul skripsi di atas memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Etika Politik dari seorang tokoh. Perbedaan adalah pada Konsep Demokrasi yang menjadi fokus penelitian.

5. Skripsi M. Muamar (2100113), Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang Jurusan Siyasah Jinayah dengan judul “Pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dan analisis menggunakan metode deskriptif analitis.<sup>22</sup> Judul skripsi di atas memiliki persamaan yaitu membahas mengenai Etika Politik dari seorang tokoh. Perbedaannya adalah pada konsep Demokrasi yang akan menjadi fokus penelitian.

## G. Kerangka Teori

### 1. Etika Politik

Etika, pada umumnya diibaratkan dengan moral. Tetapi, meskipun sama terkait dengan baik-buruknya tindakan manusia, etika dan moral memiliki perbedaan pengertian. Secara singkat, jika moral lebih condong kepada pengertian “Nilai baik buruk dari setiap perbuatan manusia itu sendiri”,

---

<sup>21</sup>Sugiyono, skripsi : “*Konsep Etika Politik dalam perspektif Ali Syari’ati*” ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009 ), hlm. 6 & 65.

<sup>22</sup>M. Muamar, skripsi : “*Pemikiran Nurcholish Madjid tentang etika politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara* “ ( Semarang : Institut Agama Islam Walisongo, 2007 ), hlm. V.

sedangkan etika adalah “Ilmu yang mempelajari tentang baik dan buruk “ sehingga etika berfungsi sebagai pedoman agar mampu memberikan pemahaman mengenai perbuatan baik dan buruk dalam penerapannya di kehidupan bermasyarakat.<sup>23</sup>

Etika adalah bagian dari kelompok Filsafat praktis dan terbagi menjadi dua kelompok yaitu etika umum dan etika khusus, etika merupakan suatu gagasan dan landasan tentang ajaran dan pandangan moral. Etika adalah suatu gagasan yang membahas penerapan tentang perbuatan atau tindakan yang berkaitan dengan baik dan buruk. Agar sikap bertanggungjawab dalam diri bisa terwujud khususnya bagi seorang penguasa dan para pejabat yang mengelola lembaga pemerintahan.

Etika umum membahas mengenai prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual yang membahas kewajiban manusia terhadap dirinya sendiri dan etika sosial yang membahas tentang kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat, yang merupakan bagian penting dari etika khusus.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>M. Amin Abdullah, *Antara Al-Ghazali dan Kant : Filsafat Etika Islam* (Yogyakarta : IRCiSoD, 2020), hlm. 7.

<sup>24</sup>Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, ( Yogyakarta: PARADIGMA, 2016), hlm. 79.

Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-wilayah kehidupan manusia tertentu misalnya, etika keluarga, etika profesi, etika lingkungan, etika pendidikan, etika seksual, dan termasuk juga etika politik yang menyangkut dimensi politis manusia. Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia.<sup>25</sup>

Artinya politik termasuk dalam lingkup etika sosial yang secara makna berkaitan dengan kehidupan politik. Oleh karena itu politik tidak bisa melepaskan diri dari etika karena politik adalah bagian dari lingkup etika itu sendiri.

Politik berasal dari kata '*politics*' yang memiliki makna segala serangkaian kegiatan tata kelola kenegaraan, seperti Pengambilan keputusan, kebijakan atau '*decisionmaking*' yang tujuannya adalah untuk kesejahteraan rakyat. politik juga menjelaskan konsep-konsep pokok yang berkaitan dengan tata kelola negara, kekuasaan atau kekuatan, pengambilan keputusan, kebijaksanaan, pembagian kekuasaan, serta alokasi kesejahteraan yang merata untuk setiap warga negara.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.87.

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 88.

## 2. Urgensi Etika Politik

Urgensi etika politik dalam sebuah negara ialah menjadi pedoman, pondasi atau pegangan untuk para penyelenggaran negara maupun para elit politik dalam menjalankan visi, misi dan tujuan organisasi kekuasaan negara agar tetap pada kode tingkah laku yang sesuai dengan etika politik.

Selain sebagai pegangan etika politik juga merupakan pengawas, pengontrol bagi segala serangkaian kegiatan berpolitik suatu negara. Etika ibarat ikatan yang tidak bisa dilepaskan dalam dunia atau kehidupan politik. Kedudukan etika dalam politik memiliki peran yang sangat penting untuk menunjang terjaminnya tata kelola pemerintahan yang berdasarkan moral.

Bahkan etika juga merupakan prasyarat menuju sistem pemerintahan yang berkeadilan. Maka bisa disimpulkan bahwa etika menjadi sangat penting dalam sebuah sistem pemerintahan untuk membangun negara yang berkeadilan. Namun jika kedudukan etika tidak diterapkan dalam pergerakan tata kelola negara, bisa dipastikan sistem pemerintahan tersebut tidak akan pernah bisa lepas dari praktek penyalahgunaan kekuasaan.

Sebab etika yang seharusnya menjadian acuan dalam penerapan tata kelola negara tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya.

## 3. Demokrasi

Kata demokrasi (lahir dari bahasa Yunani) yang terdiri dari dua kata yaitu *demos* (rakyat ) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Gabungan kata *demos* dan *cratein* atau *cratos* membentuk kata demokrasi



yang memiliki makna umum sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, dimana kedaulatan tertinggi terletak di tangan rakyat yang diterapkan melalui pemilihan umum untuk memilih kepala negara dan wakil-wakil rakyat. Secara substansial, demokrasi menurut Abraham Lincoln, adalah suatu pemerintahan yang didalamnya tidak lepas dari kontrol dan pengawasan rakyat, karena rakyat mempunyai kedudukan yang tinggi dalam sistem pemerintahan demokrasi.<sup>27</sup>

Dalam pandangan Sidney Hook, demokrasi merupakan pemerintahan dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan, yang memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintahan, dan pemegang kedaulatan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan serangkaian pengelolaan negara serta pengontrol dan pengawas baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Joseph Schmitter, demokrasi adalah perencanaan lembaga pemerintahan untuk mencapai keputusan politik dimana setiap individu memperoleh kebebasan untuk memperjuangkan kekuasaan rakyat termasuk mengeluarkan pendapat yang berkenaan dengan sistem kenegaraan. Sedangkan menurut Henry B. Mayo, demokrasi sebagai sistem politik adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan

---

<sup>27</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan : Pancasila, Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta : Kencana, 2017), hlm. 66

<sup>28</sup>Nahrowi, Masyrofah & Nurul Handayani, “ *The Dynamics Of The Democratic Process In Legal Politics In Indonesia and Egypt*”, *Jurnal Cita Hukum* 8, no. 3 (2020): hlm. 632.

atas dasar mayoritas wakil rakyat yang dikontrol dan diawasi secara efektif oleh rakyat agar terjamin nya kebebasan politik bagi setiap warga negara.<sup>29</sup>

#### 4. Macam-macam Demokrasi

Macam-macam demokrasi ini, sebagai berikut :

##### a. Demokrasi langsung

Demokrasi langsung adalah sistem pemerintahan dimana rakyat berpartisipasi aktif secara personal dalam pengambilan keputusan, kebijakan dan tata kelola pemerintahan serta pengontrol dan pengawas kepala negara yang berperan sebagai pelaksana dan wakil-wakil rakyat yang duduk dikursi DPR yang memiliki peran penting dalam pembuatan Undang-undang.

##### b. Demokrasi perwakilan

Demokrasi yang berdasarkan pada sistem perwakilan. Dimana rakyat tidak berperan aktif dalam pemilihan umum seperti dalam sistem demokrasi langsung. Bisa disebut demokrasi perwakilan adalah kebalikan dari demokrasi secara langsung. Ciri dari demokrasi perwakilan adalah walaupun mereka dipilih rakyat, tetapi mereka memiliki kebebasan untuk mengatur tata kelola pemerintahan tanpa pengawasan secara aktif dari rakyat.

##### c. Demokrasi parlementer

---

<sup>29</sup>*Ibid*, hlm. 67.

Demokrasi parlementer adalah sistem pemerintahan dimana pemegang kekuasaan tertinggi berada di tangan legislatif. Atau yang berperan aktif dalam pembuat keputusan adalah anggota perlemen selaku pembuat Undang-undang.

d. Demokrasi presidensial

Demokrasi presidensial adalah sistem pemerintahan dimana rakyat berperan aktif dalam pemilihan presiden. Presiden selain berkedudukan sebagai kepala negara juga berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Serta adalah pemisahan atau pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif yang dipimpin oleh kepala negara dan lembaga legislatif yang dipimpin oleh para anggota parlemen.

e. Demokrasi konstitusional

Demokrasi yang merujuk pada sistem pemerintahan yang berlandaskan pada aturan hukum yang berlaku disuatu negara. Maksudnya adalah segala kebijakan maupun keputusan harus berdasarkan aturan hukum yang di anut oleh negara.<sup>30</sup>

## 5. Prinsip-prinsip Demokrasi

- a. Kedaulatan Rakyat. Maksudnya ialah sistem pemerintahan yang memprioritaskan kepentingan rakyat. Artinya rakyat memiliki

---

<sup>30</sup> Fatih Syuhud, *Islam dan Politik : Sistem Khilafah dan Realitas dunia Islam*( Malang: Pustaka Alkhoirot, 2019), hlm. 2-8.

kedudukan tinggi untuk mendapatkan kesejahteraan dari kepala negara yang menjalankan kekuasaan.

- b. Sistem pemerintahan yang memfasilitasi rakyat untuk menyuarakan pendapat dalam penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh pemerintah. Prinsip ini memiliki maksud bahwa pengawasan dan kontrol dari rakyat terhadap pemerintahan adalah keharusan bagi sistem pemerintahan yang menggaungkan konsep negara demokrasi.
- c. Selain untuk memberikan kebebasan berpendapat prinsip demokrasi juga menghendaki adanya keadilan bagi seluruh rakyat. Artinya keputusan yang diambil pemerintah harus berdasarkan keadilan bagi seluruhnya tanpa menghilangkan perlindungan hak-hak minoritas.

#### 6. Ciri-ciri Pemerintahan Demokrasi

- a. Rakyat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan kebijakan sekaligus pengontrol pemerintah
- b. Mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat.
- c. Memberikan ruang kebebasan untuk mengemukakan pendapat terkhusus bagi penyelenggaraan pemerintahan.

- d. Menerapkan Pemilihan umum untuk kepala negara dan para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga legislatif.<sup>31</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *normative*, yang menggunakan metode *library research* ( Penelitian Kepustakaan).

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bisa dikategorikan dalam penelitian budaya karena berfokus pada ide, konsep atau pemikiran seorang tokoh. Sedangkan dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan terlebih dahulu bagaimana konsep Demokrasi di Indonesia Menurut etika politik Imam al-Ghazali.

Adapun metode yang digunakan adalah deskriptif analitik yaitu ingin mencoba menjelaskan Konsep Demokrasi Di Indoneisa menurut Etika Politik Imam al- Ghazali.<sup>32</sup> Sehingga dari penerapan tersebut dapat menghasilkan kesimpulan yang berbeda. Adapun langkah- langkah metodis penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi bagian-bagian yang akan dijelaskan

---

<sup>31</sup>Nur Sakinah Harahap, Skripsi : “ *Konsep Demokrasi Dalam Filsafat Politik Ibn Ruysd Terhadap Teori Plato* “ ( Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2021), hlm. 56.

<sup>32</sup>Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al- Qur'an dan Tafsir* ( Yogyakarta: CV Idea Sejahtera, 2015 ), hlm.137.

- b. Memberikan Korelasi antara faktor- faktor yang akan mempengaruhi teori.
  - c. Menunjukkan ciri dari pemikiran tokoh atau konsep yang akan dikaji.
  - d. Melakukan analisis yang mendalam disertai argumentasi data.
  - e. Membuat kesimpulan- kesimpulan untuk menjawab persoalan yang dikaji
3. Data dan Sumber Data
- a. Data
    - 1)Etika Politik Imam al-Ghazali
    - 2)Konsep Demokrasi Di Indonesia Menurut Etika Politik Imam Al-Ghazali
  - b. Sumber Data
    - 1)Sumber Data Primer
      - a) Kitab *Al- Tibr al- Masbuk Fi Nasihat al-Muluk*, karya Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali.
    - 2)Sumber Data Sekunder

Adapun data sekunder yang digunakan adalah buku yang relevan dan terkait dengan penelitian yang dikaji misalnya seperti buku Etika Berkuasa Nasihat-nasihat al-Ghazali, karya Arief B. Iskandar, Nasihat al-Ghazali bagi Penguasa terjemah dari kitab *Al- Tibr al- Masbuk Fi Nasihat al-Muluk* karya Ahmadi Thaha dan Ilyas Ismail,

Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, karya Purwanto, B., Etika Politik dan Kekuasan, karya Haryatmoko, Agama dan Pendidikan Demokrasi, karya Fuad Fachruddin. Serta jurnal dan skripsi dan situs internet yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Teknik Analisis Data

Sumber data yang diperoleh kemudian di analisis dengan menggunakan beberapa metode umum dalam penelitian:

- a. *Deskripsi*, menjelaskan suatu bahasan, tentang pemikiran yang digunakan oleh seorang tokoh dengan cara memilih data yang penting terkait untuk menjawab rumusan masalah.<sup>33</sup> Diharapkan agar penelitian terhadap konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep dari pemikiran al-Ghazali.
- b. *Induksi dan deduksi*, upaya untk mengumpulkan data dari pemikiran al-Ghazali secara umum lalu berupaya mengerucutkan pemikiran umum tersebut agar mendapatkan pemikiran al-Ghazali mengenai etika politk secara mendalam.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 175.

<sup>34</sup>Rahmat Saleh, “*Relevansi Etika Politik Imam Al-Ghazali Dalam Pemerintahan Di Indonesia*” (Tesis, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm.14.

- c. *Taksonomi*, yaitu memusatkan penelitian pada pemikiran tokoh.<sup>35</sup>  
Dalam konteks penelitian ini, analisis taksonomi digunakan untuk melacak konsep demokrasi menurut etika politik Imam al-Ghazali.
- d. *Interpretasi*, melakukan pemahaman tentang konsep dari pemikiran tokoh yang dipelajari.<sup>36</sup> Agar mampu menemukan pemikiran serta maksud dari konsep demokrasi di Indonesia menurut etika politik Imam al-Ghazali.
- e. *Tema Budaya*, merupakan upaya mencari keterkaitan yang mengintegrasikan pemikiran tokoh yang ada.<sup>37</sup> Dalam konteks penelitian fokus kajiannya pada ide, konsep atau teori dari demokrasi akan dijelaskan menurut etika politik dari Imam al-Ghazali.

## I. Sistematika Penulisan

Bab I : pendahuluan berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, signifikansi dari penelitian, definisi istilah, penelitian terdahulu, kerangka Teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi penjelasan yang berkaitan dengan latarbelakang Imam al-Ghazali dari seperti riwayat hidup, latarbelakang politik pada masa al-Ghazali, latar pendidikan, guru. Serta karya-karya yang ditulis al-Ghazali.

---

<sup>35</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D* ( Bandung : Alfabeta, 2008 ), hlm. 154.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm. 164.

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 158



Bab III : berisi pemikiran etika politik Imam al- Ghazali, pada bab ini berisi tentang, gagasan al- Ghazali mengenai etika berkuasa bagi penguasa.

Bab IV : memuat tentang analisis terhadap konsep demokrasi di Indonesia menurut etika Politik Imam Al-Ghazali. pada bab ini berisi tentang, makna dan konsep demokrasi menurut etika politik al-Ghazali.

Bab V : Penutup berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penulis dalam penelitian ini untuk masa yang akan datang. Agar memiliki manfaat.